

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran RPD 2023-2026 dan RENSTRA Tahun 2023-2026. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perubahan OPD berpedoman pada RKPD Perubahan yang telah ditetapkan sesuai peraturan Perundang-Undangan. Penyusunan rancangan awal Renja Perubahan OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran perubahan OPD.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan awal Renja perubahan OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD perubahan tahun 2023. Penyusunan Renja perubahan OPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup tahap perumusan rancangan akhir Renja perubahan OPD, dan tahap penyajian rancangan akhir Renja Perubahan OPD.

Proses Perumusan rancangan Renja perubahan OPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan OPD;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan kinerja OPD;
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
5. Telaahan terhadap perubahan RKPD ;
6. Perumusan tujuan dan sasaran;
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan;
8. Perumusan kegiatan prioritas;
9. Penyajian Akhir dokumen rancangan Renja Perubahan OPD;
10. Penyempurnaan rancangan Renja Perubahan OPD; dan
11. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Perubahan OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran yang ingin dicapai.

Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Tahun 2022 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan

Biro Organisasi yang telah ditetapkan berdasarkan dukungan program prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada pencapaian kinerja sasaran yang dalam penyusunannya memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Perubahan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sbb :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75 Tambahan Lembaran Negara No. 3851);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
6. Undang – Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo;

1.3. Rumusan Tujuan dan Sasaran

a. Maksud

Rancangan Awal Renja Perubahan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023 disusun sebagai upaya memberi arah dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi serta tujuan Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

b. Tujuan

- Menjadi pedoman bagi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Provinsi Gorontalo dalam RPD 2023-2026.
- Menjadi acuan dan dasar pengukuran kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

c. Sasaran

- Penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka mewujudkan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta efektif dan efisien.
- Penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur dan penyetaraan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional sesuai ketentuan perundangan.
- Penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang meliputi

pelaksanaan budaya kerja, peningkatan akuntabilitas kinerja, ketatalaksanaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik menuju birokrasi kelas dunia.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja (RENJA) tahun lalu dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Dari pelaksanaan evaluasi capaian kinerja tahun 2021 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo yang menjadi urusan wajib sebagai berikut:

1. Program Penataan Organisasi dalam 5 (lima) sub kegiatan;
 1. Fasilitasi penataan kelembagaan provinsi
 2. Fasilitasi penataan kelembagaan kab/kota
 3. Penataan analisis jabatan
 4. Pengelolaan tata laksana pemerintahan
 5. Fasilitasi pelayanan public

Pada tahun Perencanaan 2023 Biro Organisasi melaksanakan 2 Program dan 10 Kegiatan, hal tersebut sesuai dengan dokumen Renstra Biro Organisasi tahun 2023-2026. Pada tahun perencanaan 2023 seluruh pelaksanaan kegiatan yang terdapat pada dokumen Rencana Kerja Telah dilaksanakan dan telah memnuhi semua target yang telah ditetapkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Tahun 2021

Analisis kinerja pelayanan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pelaksanaan rencana kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan telah terlaksananya sebagian besar kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja 2021 berdasarkan Laporan Kegiatan sampai dengan akhir triwulan IV mencapai realisasi rata-rata sebesar 99 persen.

Pada Triwulan I merupakan langkah sebagai langkah awal menilik target triwulan pertama. Hal ini tentu merupakan awal Biro Organisasi melakukan Evaluasi berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan pada Renstra. Pada Triwulan pertama ini masih banyak yang perlu dibenahi baik dari segi administrasi, program/kegiatan dan sarana penunjang perkantoran. Sebab Biro Organisasi merupakan OPD yang baru mengalami perampingan OPD.

Pada Triwulan II progres dari program/kegiatan sudah mulai berjalan dengan baik. Pada triwulan kedua Biro Organisasi sudah masuk 55% Realisasi Program/kegiatan Biro Organisasi. Selanjutnya pada triwulan ke III penyerapan anggaran Biro organisasi sudah mencapai 83%. Meskipun demikian, ada beberapa kegiatan yang belum maksimal pelaksanaannya, seperti Sub bagian Akuntabilitas Kinerja yang notabene tidak mendapatkan anggaran pada tahun 2021. Namun Hal ini bukanlah hambatan dalam meningkatkan Kinerja Biro Organisasi. Ada beberapa solusi yang ditempuh yakni menggunakan anggaran pada Sub kegiatan reformasi birokrasi dalam menunjang kegiatan akuntabilitas kinerja. Hal ini dibuktikan dengan terselenggaranya kegiatan Sakip Award pada tahun 2021. Hal ini banyak menjadi perhatian dari OPD lain bahwa keterbatasan anggaran tidak akan menurunkan Kinerja OPD.

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada Biro Organisasi adalah terbatasnya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, Biro Organisasi yang memiliki tugas dan fungsi sebagai *leading sector* sasaran strategis daerah, sangat memerlukan dukungan dan komitmen seluruh stakeholders dalam upaya mewujudkan tujuan pembagian Daerah utamanya dalam mendukung terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Untuk capaian kinerja dan pelayanan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 dapat dilihat pada **Tabel 2.2.** (Daftar Terlampir)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu strategis pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Organisasi meliputi :

- Penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka mewujudkan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta efektif dan efisien.

- Penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur dan penyetaraan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional sesuai ketentuan perundangan.
- Penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang meliputi pelaksanaan budaya kerja, peningkatan akuntabilitas kinerja, ketatalaksanaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik menuju birokrasi kelas dunia.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Biro Organisasi yaitu :

a. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai.

Saat ini SDM yang dimiliki masih belum memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dengan berbagai macam tugas dan fungsi yang makin banyak, diperlukan SDM yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi di bidang penataan organisasi.

b. Kurangnya sarana prasarana yang memadai untuk melaksanakan tugas dan Fungsi.

Saat ini kondisi sarana dan prasarana yang ada di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo masih belum mencapai kondisi yang ideal. Di tengah tuntutan dan harapan yang tinggi terhadap kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, maka tentunya diharapkan sarana dan prasarana pendukung dapat diwujudkan sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan secara bertahap.

c. Reformasi Birokrasi

Isu dan permasalahan terkait dengan Reformasi Birokrasi mencakup target Indeks Reformasi Birokrasi yang belum tercapai baik komponen pengungkit maupun komponen hasil. Hal ini termasuk upaya mendorong perbaikan budaya kerja serta fasilitasi implementasi Reformasi Birokrasi di seluruh OPD.

d. Akuntabilitas Kinerja

Pencapaian target atas akuntabilitas kinerja baik Pemerintah Daerah maupun setiap OPD masih membutuhkan kerja keras sehingga target yang dituangkan dalam RPJMD dapat tercapai. Hal tersebut dapat didukung oleh pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM dibidang akuntabilitas

kinerja dan manajemen kinerja serta peningkatan kapasitas SDM evaluator internal.

Perlunya dilakukan pendidikan dan pelatihan guna peningkatan kapasitas SDM dibidang akuntabilitas kinerja dan manajemen kinerja..

Fungsi pembinaan dan pengawasan Kab/Kota belum maksimal antara lain karena belum adanya pedoman teknis monitoring akuntabilitas kinerja.

e. Penataan Kelembagaan

Saat ini, isu penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah lagi gencar-gencarnya. Berbagai kebijakan dan regulasi terkait penataan kelembagaan telah ditelurkan oleh Pemerintah Pusat sehingga menuntut penataan kembali terhadap Perangkat Daerah mulai dari struktur organisasi beserta jabatan struktural yang ada didalamnya. Berbagai isu penataan kelembagaan itulah yang membuat perangkat daerah belum sepenuhnya ideal, belum tepat ukuran dan dan tepat fungsi.

f. Ketatalaksanaan

Di bidang ketatalaksanaan, penyusunan dan penerapan Peta Proses Bisnis dan SOP belum optimal, baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun OPD, sehingga masih diperlukan pendampingan dan fasilitasi guna optimalisasi penerapan Peta Proses Bisnis dan SOP.

Selain itu, penyusunan pedoman standarisasi ruangan, tata naskah dinas, pakaian dinas di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo juga masih perlu perbaikan.

g. Pelayanan Publik

Belum tersusunnya standar pelayanan pada setiap OPD, sebagaimana amanah Peraturan Menteri PAN RB No. 15 Tahun 2014 sehingga perlu dorongan dan fasilitasi dalam penyusunannya. Perlunya mendorong OPD untuk melakukan inovasi pelayanan publik dan diikutsertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan akhir RKPD Perubahan dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan akhir RKPD.

Rumusan rancangan akhir Renja sebagian besar telah berpedoman pada RKPD, berikut adalah indikator kinerja dan terget capaian kinerja pada dokumen Renja dan RKPD tahun 2021:

Tabel Perbandingan Renja dan RKPD Tahun 2021

No.	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Renja	RKPD	Pagu Dana
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	100%	4.170.984.368
	Sub Kegiatan penyusunan Dokumen perencanaan daerah	6 dok	6 dok	197.806.840
2.	Kegiatan Administrasi Umum	100%	100%	525.318.125
	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	525.318.125
3.	Kegiatan administrasi Kepegawaian perangkat daerah	6 orang	6 orang	50.314.100
	Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	6 orang	6 orang	50.314.100
4.	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	113.545.994
	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	3.041.617.663
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan	3 dok	3 dok	113.545.994

	Bulanan/Triwulan/SemesteranSKPD			
5.	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	242.381.646
	Sub kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	242.381.646
II	Program Penataan organisasi	100%	100%	1.045.467.375
6.	Kegiatan fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan	100%	100%	430.605.043
	Sub kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan provinsi	32 OPD	32 OPD	162.082.619
	Sub kegiatan Penataan analisis jabatan	2 Lap	2 Lap	160.000.004
	Sub kegiatan Fasilitasi penataan kelembagaan kab/kota	100%	100%	108.522.420
7.	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	100%	100%	614.862.332
	Sub Kegiatan Pembinaan Reformasi Birokrasi	1 Lap	1 Lap	162.735.465
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Dok	1 Dok	131.637.207
	Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	0	0	0
	Sub kegiatan pengelolaan tata laksana pemerintahan	5 dok	5 dok	125.015.951
	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik	2 Proposal	2 Proposal	195.473.709

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan

Usulan program dan kegiatan prioritas pemabangunan merupakan kebutuhan dan harapan guna dukungan pencapaian tujuan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi Biro Organisasi. Terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan dalam perubahan ini, sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu diarahkan pada tugas

Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik.

Penelaahan usulan program dan kegiatan disajikan pada **tabel Tc.31**.
(Daftar Terlampir)

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo berkaitan langsung dengan rumusan rencana program yang tertuang dalam RPJMD dan yang telah di jabarkan dalam kegiatan yang tertuang dalam RKPD tahun 2023 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Rencana program beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RENSTRA yang selanjutnya dijabarkan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Kegiatan yang ditetapkan untuk setiap program, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program pendukung yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan Pendukung beserta kebutuhan pendanaannya. Rencana program, kegiatan, dan pendanaan yang dijabarkan ke dalam RENJA Tahun 2023 adalah sebagaimana terlampir pada **Tabel Tc.2.9**

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Perubahan Tahun 2023 adalah merupakan acuan bagi rencana Organisasi Perangkat Daerah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dalam mengimplementasikan program di bidang penataan organisasi yang melingkupi kegiatan penataan kelembagaan dan analisis jabatan, Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Evaluasi Budaya Kerja, Ketatalaksanaan dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan untuk memberi gambaran mengenai capaian pelaksanaan Renja Biro Organisasi pada triwulan sebelumnya yang berguna sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan disisi tahun 2023 ini. Keberhasilan kinerja pelaksanaan Renja OPD sangat ditentukan oleh kesamaan visi dan misi, serta keterpaduan maupun dukungan dari seluruh pihak utamanya kinerja di internal Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023 ini disampaikan, dengan harapan hasil yang telah dicapai sejauh ini, dapat terus ditingkatkan dan yang belum mencapai hasil maksimal dapat menjadi perhatian untuk dilakukan perbaikan secara masif dan komprehensif. Renja Perubahan Biro Organisasi bidang Penataan Organisasi ini disusun juga sebagai bahan acuan dan penetapan kebijakan dan perumusan program kerja di masa yang akan datang.

Gorontalo, Juli 2022

**Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Gorontalo**



Dr. Ir. Aryanto Husain, MMP
NIP. 197001151998031010

TABEL 2.2
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2021
PROVINSI GORONTALO

Nama OPD : BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI GORONTALO

Kode	Program dan Kegiatan (Berdasarkan PERMENDAGRI 13/2006)	Program dan Kegiatan (Berdasarkan PERMENDAGRI 90/2019) / PERMENDAGRI 050-3708	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja OPD tahun 2019	Realisasi Renja OPD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
I		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang Tersusun	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	8 Dokumen	18 dokumen	13
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	5 Dokumen	15 dokumen	10
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36 bulan	24
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Di Berikan Gaji dan Tunjangan	26 Orang	26 Orang	26 Orang	26 Orang	100	26 Orang	78 orang	52
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun	3 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	3 Laporan	11 laporan	3
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat, Bimtek dan Workshop	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100	20 Orang	60 orang	40

		- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek dan Diklat	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100	20 Orang	60 orang	40
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
		- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 paket	2
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Layanan dan Manajemen Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
		- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di laksanakan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
II	Program Penataan kelembagaan Perangkat Daerah	-	Persentase penataan kelembagaan perangkat daerah	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
		Program Penataan Organisasi	Terlaksananya fasilitasi Kegiatan Kelembagaan, Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	32 OPD Provinsi dan 6 kab/kota	-	-	-	-	32 OPD Provinsi dan 6 kab/kota	32 OPD Provinsi dan 6 kab/kota	32 OPD Provinsi dan 6 kab/kota
		Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya penataan kelembagaan OPD Provinsi dan Kab/Kota	32 OPD Provinsi dan 6 Kab/Kota	-	-	-	-	32 OPD Provinsi dan 6 Kab/Kota	32 OPD Provinsi dan 6 Kab/Kota	32 OPD Provinsi dan 6 Kab/Kota
	Kegiatan Pembinaan dan evaluasi OPD	- Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Tersusunnya dokumen pembentukan, penyempurnaan dan pembubaran organisasi perangkat daerah	32 OPD Provinsi	3 laporan	1 laporan	1 laporan	100	32 OPD Provinsi	32 OPD Provinsi	32 OPD Provinsi
	Kegiatan Pembentukan, Penyempurnaan dan Pembubaran Perangkat Daerah										
	Kegiatan Bimbingan Teknis Analisis Jabatan (Anjab)										
		- Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Tersusunnya dokumen analisis jabatan dan ABK, Evaluasi jabatan, Standar kompetensi Jabatan	32 OPD Provinsi dan 6 Kab/Kota	300 orang peningkatan kapasitas SDM	1 laporan	1 laporan	100	32 OPD Provinsi dan 6 Kab/Kota	32 OPD Provinsi dan 6 Kab/Kota	32 OPD Provinsi dan 6 Kab/Kota
	Kegiatan Monitoring, evaluasi Anjab/ABK Kabupaten/Kota	- Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rekomendasi dan persetujuan pembentukan, penyempurnaan dan pembubaran organisasi perangkat daerah kab/kota	6 kab/kota	2 laporan movev	1 laporan	1 laporan	100	6 kab/kota	6 kab/kota	6 kab/kota

III	Program Penyusunan Dokumen dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	-	Persentase penyusunan dokumen pelayanan	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
		Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Terlaksananya fasilitasi percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan penguatan akuntabilitas kinerja	8 Area Perubahan	-	-	-	-	8 Area Perubahan	8 Area Perubahan	8 Area Perubahan
	Kegiatan Penetapan dan Evaluasi SOP	- Sub Kegiatan Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Terlaksananya penyusunan Peta Proses Bisnis, SOP.	1 Peta proses bisnis Pemda, 32 Dok Peta Proses Bisnis OPD, dan 32 dok SOP Revisi	32 dok SOP	5 dokumen SOP yang dievaluasi	3 dokumen SOP	60	1 Peta proses bisnis Pemda, 32 Dok Peta Proses Bisnis OPD, dan 32 dok SOP Revisi	1 Peta proses bisnis Pemda, 32 Dok Peta Proses Bisnis OPD, dan 32 dok SOP Revisi	1 Peta proses bisnis Pemda, 32 Dok Peta Proses Bisnis OPD, dan 32 dok SOP Revisi
	Kegiatan Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Penyusunan Laporan Capaian										
	Kegiatan Layanan keikutsertaan pada kompetisi inovasi Pelayanan Publik	- Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya fasilitasi penyusunan dokumen pengusulan dan move Inovasi Pelayanan Publik,	1 Dokumen Lap Pelayanan Pemda, 32 Standar Pelayanan OPD, 7 Proposal Inovasi, 1 Lap Survei Kepuasan Masyarakat	3 Proposal Inovasi pelayanan publik	2 proposal inovasi pelayanan publik	3 proposal inovasi pelayanan publik	150	1 Dokumen Standar Pelayanan, 2 Proposal	1 Dokumen Standar Pelayanan, 2 Proposal	1 Dokumen Standar Pelayanan, 2 Proposal
IV	Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	Persentase pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
	Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	- Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Terlaksananya fasilitasi peningkatan Budaya Kerja dan Budaya Organisasi (Tim RB, dan Agen perubahan)	1 Pedoman, 32 SK Tim RB, 32 SK Agen Perubahan	10 SK Tim RB, 10 SK Agen Perubahan	10 SK Tim RB, 10 SK Agen Perubahan	10 SK Tim RB, 10 SK Agen Perubahan	100	1 Pedoman, 32 SK Tim RB, 32 SK Agen Perubahan	1 Pedoman, 32 SK Tim RB, 32 SK Agen Perubahan	1 Pedoman, 32 SK Tim RB, 32 SK Agen Perubahan

	Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan konsolidasi Data Kinerja Instansi Pemerintah	- Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Terlaksananya fasilitasi dan monitoring evaluasi akuntabilitas kinerja	2 dok kinerja daerah, 1 Pedoman, 32 OPD Provinsi dan 6 kab/kota	2 dok kinerja Daerah, 85 orang peningkatan kapasitas SDM Manajemen kinerja	85 orang, 2 dok Kinerja Daerah, 32 OPD Provinsi	85 orang, 2 dok Kinerja Daerah, 32 OPD Provinsi	100	2 dok kinerja daerah, 1 Pedoman, 32 OPD Provinsi dan 6 kab/kota	2 dok kinerja daerah, 1 Pedoman, 32 OPD Provinsi dan 6 kab/kota	2 dok kinerja daerah, 1 Pedoman, 32 OPD Provinsi dan 6 kab/kota
	Kegiatan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi	- Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Pemprov Gorontalo dan Pembinaan Kab/Kota	1 Laporan	1 Roadmap RB, 1 lap tahapan penyusunan roadmap RB	1 laporan hasil pelaksanaan RB	1 laporan hasil pelaksanaan RB	100	1 Laporan	3 Laporan	2 Laporan

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Provinsi Gorontalo

Nama Perangkat Daerah : Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo

Lembar :

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Perencanaan									
1 01	Bidang Urusan Wajib									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Pelayanan Jasa Administarsi Perkantoran (Biro Organisasi)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor (Biro Organisasi)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 paket	1 paket	100%	1 Paket	3 Paket	3 Paket
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100%	20 Orang	80 Orang	40 Orang

				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Kinerja Perangkat Daerah	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	100%	5 dok	15 dok	5 dok
				Koordinasi Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 lap	4 lap	3 lap	3 lap	100%	4 Lap	11 Lap	100%
				PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Terlaksananya fasilitasi Kegiatan Kelembagaan, Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	100%	100%	32 OPD provinsi dan 6 Kab/kota	32 OPD provinsi dan 6 Kab/kota	100%	32 OPD provinsi dan 6 Kab/kota	100%	100%
				Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	32 OPD provinsi	100%	32 OPD provinsi	32 OPD provinsi	100%	32 OPD provinsi	32 OPD provinsi	100%
				Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	32 OPD provinsi dan 6 Kab/kota	-	32 OPD provinsi dan 6 Kab/kota	32 OPD provinsi dan 6 Kab/kota	100%	32 OPD provinsi dan 6 Kab/kota	32 OPD provinsi dan 6 Kab/kota	100%
				Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	6 kab/kota	-	6 kab/kota	6 kab/kota	100%	6 kab/kota	100%	100%
				Kegiatan Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Terlaksananya penyusunan Peta Proses Bisnis, SOP.	1 Peta Proses Bisnis Pemda, 32 Dok Peta Proses Bisnis OPD, 32 dok SOP Revisi	5 dok SOP yang dievaluasi	1 Peta Proses Bisnis Pemda, 32 Dok Peta Proses Bisnis OPD, 32 dok SOP Revisi	1 Peta Proses Bisnis Pemda, 32 Dok Peta Proses Bisnis OPD, 32 dok SOP Revisi	100%	1 Peta Proses Bisnis Pemda, 32 Dok Peta Proses Bisnis OPD, 32 dok SOP Revisi	100%	100%
				Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya fasilitasi penyusunan dokumen pengusulan dan monev Inovasi Pelayanan Publik	1 dok lap pelayanan Pemda, 32 SP OPD, 7 Proposal Inovasi, 1 Lap SKM	2 Proposal	1 Dok SP, 2 Proposal	1 Dok SP, 2 Proposal	100%	1 dok lap pelayanan Pemda, 32 SP OPD, 7 Proposal Inovasi, 1 Lap SKM	3 dok SP, 6 Proposal, 1 lap SKM	100%

				Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Pedoman, 32 SK Tim RB, 32 SK Agen Perubahan	10 SK tim RB, 10 SK agen perubahan	1 Pedoman, 32 SK Tim RB, 32 SK Tim Perubahan	1 Pedoman, 32 SK Tim RB, 32 SK Tim Perubahan	100%	1 Pedoman, 32 SK Tim RB, 32 SK Agen Perubahan	100%	100%
				Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	2 Pedoman Kinerja daerah, 1 pedoman, 32 OPD Provinsi, 6 kab/kota	85 orang, 2 dokumen kinerja daerah, 32 OPD Provinsi	2 dok kinerja daerah, 1 pedoman, 32 OPD provinsi, 6 kab/kota	2 dok kinerja daerah, 1 pedoman, 32 OPD provinsi, 6 kab/kota	100%	2 Pedoman Kinerja daerah, 1 pedoman, 32 OPD Provinsi, 6 kab/kota	6 dokumen kinerja, 3 pedoman, 85 orang, 32 OPD provinsi, 6 Kab/kota	100%
				Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	100%

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nama Perangkat Daerah : Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Terlaksananya fasilitasi penyusunan dokumen pengusulan dan monev Inovasi Pelayanan Publik	-	-	2 Proposal Inovasi	1 Dok SP 2 Proposal	1 lap Pelayanan Pemda 7 Proposal, 32 SP, 1 Lap SKM	29 Dok (12 Dok SP, 5 Dok IPP, 12 Dok IKM)	100%	100%	100%	100%	

TABEL TC.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
PROVINSI GORONTALO

Nama SKPD : BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI GORONTALO

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Provinsi Gorontalo	Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	100%	Rp 4.969.849.964	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Biro Organisasi	Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	100%	Rp 4.969.849.964	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah	7 Dok, 8 Lap	Rp305.189.300	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Organisasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah	7 Dok, 8 Lap	Rp 305.189.300	
	- Sub Kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	Rp 305.189.300	- Sub Kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Biro Organisasi	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	Rp 305.189.300	
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Pengadaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkantoran	3 Paket 12 Laporan	Rp 236.741.576	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Biro Organisasi	Jumlah Pengadaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkantoran	3 Paket 12 Laporan	Rp 236.741.576	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Gorontalo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp 236.741.576	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Biro Organisasi	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp 236.741.576	
3	Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat, Blmtek dan Workshop	12 Orang	Rp 70.856.000	Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Biro Organisasi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat, Blmtek dan Workshop	12 Orang	Rp 70.856.000	
	- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Gorontalo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	Rp 70.856.000	- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Biro Organisasi	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	Rp 70.856.000	
5	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	12 Laporan	Rp 4.147.876.088	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Biro Organisasi	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	12 Laporan	Rp 4.147.876.088	

	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Gorontalo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang	Rp 4.000.000.288,00	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Biro Organisasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang	Rp 4.000.000.288	
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	Rp 147.875.800,00	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD	Biro Organisasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	Rp 147.875.800	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Lap	Rp 209.187.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Organisasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Lap	Rp 209.187.000	
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Lap	Rp209.187.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Biro Organisasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Lap	Rp 209.187.000	
II	Program Penataan Organisasi	Provinsi Gorontalo	Terlaksananya fasilitasi Kegiatan Kelembagaan, Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	38%	Rp 1.143.087.699	Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi	Terlaksananya fasilitasi Kegiatan Kelembagaan, Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	38%	#####	
6	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Provinsi Gorontalo	Terlaksananya penataan kelembagaan OPD Provinsi dan Kab/Kota	12 OPD, 6 Kab/kota	Rp 452.950.379	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Biro Organisasi	Terlaksananya penataan kelembagaan OPD Provinsi dan Kab/Kota	12 OPD, 6 Kab/kota	Rp452.950.379,00	
	- Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	12 Dok OPD	Rp 203.172.795,00	- Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Biro Organisasi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	12 Dok OPD	Rp203.172.795,00	
	- Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	12 dok, anjab, evjab, abk	Rp 146.206.600,00	- Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Biro Organisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	12 dok, anjab, evjab, abk	Rp146.206.600,00	
	- Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	6 dok	Rp 103.570.984,00	- Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Biro Organisasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	6 dok	Rp103.570.984,00	
7	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Provinsi Gorontalo	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja	12 OPD, 6 Kab/kota	Rp 690.137.320	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Biro Organisasi	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja	12 OPD, 6 Kab/kota	Rp690.137.320,00	
	- Sub Kegiatan Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	25 Dok (1 Dok Probis Pemda, 12 Probis OPD, 12 Dok SOP OPD)	Rp 134.141.000	- Sub Kegiatan Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Biro Organisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	25 Dok (1 Dok Probis Pemda, 12 Probis OPD, 12 Dok SOP OPD)	Rp134.141.000,00	

	- Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	29 Dok (12 Dok SP, 5 Dok IPP, 12 Dok IKM)	Rp 209.260.262	- Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Biro Organisasi	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	29 Dok (12 Dok SP, 5 Dok IPP, 12 Dok IKM)	Rp209.260.262,00	
	- Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	2 Dok (1 Dok Evaluasi Budaya Kerja dan 1 Dok Penguatan dan Internalisasi Budaya Kerja)	Rp 107.288.120	- Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Biro Organisasi	- Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	2 Dok (1 Dok Evaluasi Budaya Kerja dan 1 Dok Penguatan dan Internalisasi Budaya Kerja)	Rp107.288.120,00	
	- Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	34 Dok (1 Dokumen PK Pemda, 1 Dokumen LKIP Pemda, 32 Dokumen SAKIP OPD)	Rp 100.058.038	- Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Biro Organisasi	- Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	34 Dok (1 Dokumen PK Pemda, 1 Dokumen LKIP Pemda, 32 Dokumen SAKIP OPD)	Rp100.058.038,00	
	- Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi	33 Dok (1 PMPRB Pemda, 32 PMPRB OPD)	Rp 139.389.900	- Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Biro Organisasi	- Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi	33 Dok (1 PMPRB Pemda, 32 PMPRB OPD)	Rp139.389.900,00	
JUMLAH					6.112.937.663	J U M L A H				6.112.937.663	

TABEL TC. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SOPD TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PROVINSI GORONTALO

Nama SKPD : BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI GORONTALO

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Provinsi Gorontalo	100%	Rp 4.969.849.964	APBD	100%	Rp 5.227.919.088
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	7 Dok	Rp 305.189.300	APBD	5 Dok, 8 Lap	Rp 300.000.000
	- Sub Kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	7 dok	Rp 305.189.300	APBD	5 Dok	Rp 300.000.000
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Provinsi Gorontalo	3 Paket	Rp 236.741.576	APBD	3 Paket	Rp 500.000.000
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi Gorontalo	3 Paket	Rp 236.741.576	APBD	3 pkt, 8 lap	Rp 500.000.000
3	Kegiatan Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat, Bimtek dan Workshop	Provinsi Gorontalo	12 Orang	Rp 70.856.000	APBD	12 Orang	Rp 70.856.000
	- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi Gorontalo	12 Orang	Rp 70.856.000	APBD	12 Orang	Rp 70.856.000
5	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Provinsi Gorontalo	12 Laporan	Rp 4.147.876.088	APBD	12 Laporan	Rp 4.147.876.088
	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Gorontalo	26 Orang	Rp 4.000.000.288	APBD	30 Orang	Rp 3.600.000.000

	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Provinsi Gorontalo	12 Laporan	Rp 147.875.800	APBD	12 Laporan	Rp 147.875.800	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi Gorontalo	6 Lap	Rp 209.187.000	APBD	6 Lap	Rp 209.187.000	
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi Gorontalo	6 Lap	Rp 209.187.000	APBD	6 Lap	Rp 209.187.000	
II	Program Penataan Organisasi	Terlaksananya fasilitasi Kegiatan Kelembagaan, Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Provinsi Gorontalo	0,38	Rp 1.143.087.699	APBD	0,38	Rp 2.375.000.000	
6	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya penataan kelembagaan OPD Provinsi dan Kab/Kota	Provinsi Gorontalo	12 OPD Provinsi dan 6 kab/kota	Rp 452.950.379	APBD	12 OPD Provinsi dan 6 kab/kota	Rp 900.000.000	
	- Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	Provinsi Gorontalo	12 Dok OPD	Rp 203.172.795	APBD	12 Dok OPD	Rp 350.000.000	
	- Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Provinsi Gorontalo	12 dok, anjab, evjab, abk	Rp 146.206.600	APBD	12 dok, anjab, evjab, abk	Rp 350.000.000	
	- Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Provinsi Gorontalo	6 dok	Rp 103.570.984	APBD	6 dok	Rp 200.000.000	
7	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja	Provinsi Gorontalo	12 OPD, 6 Kab/kota	Rp 690.137.320	APBD	12 OPD, 6 Kab/kota	Rp 1.475.000.000	
	- Sub Kegiatan Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Provinsi Gorontalo	25 Dok (1 Dok Probis Pemda, 12 Probis OPD, 12 Dok SOP OPD)	Rp 134.141.000	APBD	25 Dok (1 Dok Probis Pemda, 12 Probis OPD, 12 Dok SOP OPD)	Rp 350.000.000	
	- Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Provinsi Gorontalo	29 Dok (12 Dok SP, 5 Dok IPP, 12 Dok IKM)	Rp 209.260.262	APBD	29 Dok (12 Dok SP, 5 Dok IPP, 12 Dok IKM)	Rp 375.000.000	

- Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Provinsi Gorontalo	2 Dok (1 Dok Evaluasi Budaya Kerja dan 1 Dok Penguatan dan Internalisasi Budaya Kerja)	Rp 107.288.120	APBD	1 Dok Evaluasi Budaya Kerja	Rp 150.000.000
- Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Provinsi Gorontalo	34 Dok (1 Dokumen PK Pemda, 1 Dokumen LKIP Pemda, 32 Dokumen SAKIP OPD)	Rp 100.058.038	APBD	34 Dok (1 Dokumen PK Pemda, 1 Dokumen LKIP Pemda, 32 Dokumen SAKIP OPD)	Rp 350.000.000
- Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi	Provinsi Gorontalo	33 Dok (1 PMPRB Pemda, 32 PMPRB OPD)	Rp 139.389.900	APBD	33 Dok (1 PMPRB Pemda, 32 PMPRB OPD)	Rp 250.000.000
JUMLAH				6.112.937.663			7.602.919.088